

**Pengaruh Gerakan Petani terhadap *Trajectory* Perjuangan Reforma Agraria  
(Kasus Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor)**

***The Effect of Peasant Movement on the Trajectory of Agrarian Reform Struggle  
(The Case of Cisarua Village, Nanggung District, Bogor Regency)***

Ilham Rizkia Maulana, Mohamad Shohibuddin<sup>\*</sup>)

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia

<sup>\*</sup>E-mail korespondensi: [m-shohib@apps.ipb.ac.id](mailto:m-shohib@apps.ipb.ac.id)

Diterima: 13 Desember 2023 | Direvisi: 03 April 2024 | Disetujui: 16 Mei 2024 | Publikasi Online: 26 Juli 2024

**ABSTRACT**

*Land tenure inequality and agrarian conflicts remain critical challenges in the implementation of agrarian reform in Indonesia. This study examines the anatomy and solidarity of the peasant movement Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif (AMANAT) and its influence on the trajectory of agrarian reform struggle, particularly in pro-poor land governance and land tenure structure in Cisarua Village, Nanggung District, Bogor Regency. Using a mixed-methods approach, quantitative data was gathered from surveys involving 30 AMANAT farmers, supplemented by qualitative insights from observation and in-depth interviews. The findings reveal that AMANAT demonstrates strong solidarity characterized by high levels of diagnostic, prognostic, and motivational framing. Structural equation modeling (PLS-SEM) analysis confirmed a significant positive influence of the peasant movement on the trajectory of agrarian reform (path coefficient = 0.720; p-value = 0.000). Additionally, AMANAT effectively established networks with local governments and NGOs, significantly contributing to pro-poor land governance. This study concludes that organized peasant movements critically influence inclusive land access policies, providing a replicable model for socially just agrarian reform.*

**Keywords:** agrarian reform, anatomy of peasant movement, pro-poor land governance, solidarity of peasant movement

**ABSTRAK**

Ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria masih menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan program reforma agraria di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anatomi dan solidaritas gerakan petani Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif (AMANAT) di Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor serta pengaruhnya terhadap trajektori perjuangan reforma agraria, khususnya dalam konteks struktur penguasaan tanah dan kebijakan pertanahan yang memihak kaum miskin (*pro-poor land governance*). Metode penelitian campuran (*mixed-methods*) digunakan untuk pengumpulan data kuantitatif melalui survei terhadap 30 petani AMANAT dan didukung oleh data kualitatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan AMANAT memiliki solidaritas tinggi, tercermin dari pembedingkaian diagnostik, prognostik, dan motivasi yang kuat. Analisis PLS-SEM menunjukkan gerakan petani AMANAT secara signifikan berpengaruh terhadap trajektori perjuangan reforma agraria (path coefficient = 0,720; p-value = 0,000). Selain itu, AMANAT berhasil membangun jejaring dengan pemerintah daerah dan LSM yang secara nyata mendorong terwujudnya kebijakan pertanahan yang memihak kelompok miskin. Studi ini menyimpulkan bahwa gerakan petani yang terorganisir memiliki peranan strategis dalam mempengaruhi kebijakan pertanahan inklusif dan menjadi model bagi pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan sosial.

**Kata kunci:** anatomi gerakan petani, pro-poor land governance, reforma agraria, solidaritas gerakan petani

## PENDAHULUAN

Persoalan struktural terkait penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria masih menjadi isu sentral dalam agenda pembangunan dan keadilan sosial di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan telah diupayakan pemerintah, permasalahan struktural ini masih terus berlanjut. Shohibuddin (2019) mengidentifikasi empat persoalan utama terkait ketimpangan agraria, yaitu: (1) keterbatasan atau bahkan ketiadaan akses petani terhadap lahan pertanian; (2) kebijakan alokasi tanah oleh negara yang bias korporasi dan tidak berpihak pada kepentingan pertanian rakyat; (3) ancaman perubahan komoditas pertanian dari pangan menjadi non-pangan; dan (4) ancaman konversi lahan dari pertanian menjadi non-pertanian. Persoalan-persoalan ini menyebabkan berbagai dampak multidimensi, seperti konflik agraria, degradasi lingkungan, perubahan bentang alam, serta kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang semakin meningkat

Sebagai respons terhadap persoalan di atas, berbagai bentuk gerakan sosial muncul sebagai manifestasi perlawanan politik dari bawah. Menurut Tilly (1977), gerakan sosial adalah rangkaian tindakan kolektif yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi mereka dalam ruang politik melalui berbagai bentuk kampanye dan negosiasi. Pada gerakan petani, hal ini mengemuka dalam bentuk serangkaian aksi kolektif yang bertujuan mengadvokasi terlaksananya reforma agraria yang adil, mulai dari pendudukan lahan, pembentukan organisasi tani, hingga negosiasi kebijakan dengan pemerintah agar berpihak kepada petani kecil (Brockett 1991). Supaya masyarakat—termasuk petani—dapat berpartisipasi secara efektif dalam ruang politik, mereka memerlukan sejumlah persyaratan dasar, seperti minat terhadap isu yang diperjuangkan, adanya organisasi yang solid, kemampuan mobilisasi, aksi kolektif yang terencana, serta kesempatan politik yang tersedia (Tilly, 1977). Kendati gerakan petani sering menghadapi tantangan besar dan menuntut pengorbanan yang signifikan, sejarah menunjukkan bahwa gerakan tersebut mampu mencapai hasil konkret dalam berbagai konteks perjuangan agraria. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya peluang politik dan strategi yang tepat guna memperkuat posisi politik para petani dalam mendorong kebijakan reforma agraria yang berpihak kepada kepentingan mereka.

Salah satu kasus konflik dan perjuangan agraria yang relevan untuk konteks ini terjadi di Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Konflik ini melibatkan petani yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif (AMANAT) dengan perusahaan perkebunan PT. Hevea Indonesia (Hevindo). Tanah yang menjadi sengketa adalah lahan eks-Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Hevindo yang diberikan melalui SK HGU Nomor 29/H.G.U/DA/88 tertanggal 4 April 1988 untuk pengusahaan tanaman karet dan pengolahan hasilnya. Namun, sejak tahun 1990-an, lebih dari 75 persen lahan perkebunan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan dan dalam kondisi terlantar. Akibatnya, petani setempat dari Desa Nanggung, Curugbitung dan Cisarua mulai menggarap lahan tersebut untuk diusahakan secara produktif guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Situasi konflik mulai memanas pada tahun 2010 ketika perusahaan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran tanah untuk memperpanjang HGU tanpa melibatkan petani penggarap maupun pemerintah desa. Pada 23 Juni 2011, Pemerintah Kabupaten Bogor mengirimkan surat kepada Kepala BPN RI yang memberikan rekomendasi untuk perpanjangan HGU PT. Hevindo. Pada bulan Juli 2011 para petani dikejutkan oleh keberadaan patok-patok merah bertuliskan BPN/PT Hevindo di lahan-lahan yang mereka garap.

Ketegangan memuncak pada tahun 2013 ketika perusahaan melakukan perusakan terhadap tanaman milik petani yang telah ditanam di lahan sengketa. Sebagai respons, petani kemudian melakukan aksi demonstrasi di kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor. Namun, aksi ini tidak segera membuahkan hasil signifikan. Oleh karena itu, petani dari tiga desa tersebut akhirnya bersepakat untuk membentuk organisasi perjuangan yang diberi nama Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif (AMANAT). Organisasi ini dibentuk sebagai wadah perjuangan bersama untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria pada lahan eks-HGU yang disengketakan tersebut.

Dinamika perjuangan AMANAT dalam memperjuangkan pelaksanaan reforma agraria di Kecamatan Nanggung menunjukkan kompleksitas tersendiri. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kajian komprehensif yang secara eksplisit mengukur sejauh mana anatomi dan solidaritas dalam gerakan sosial petani ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap trajektori perjuangan reforma agraria, khususnya pada aspek kebijakan pertanahan yang pro-kaum miskin (*pro-poor land governance*) serta perubahan struktur penguasaan tanah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pokok sebagai berikut: (1) Bagaimana anatomi gerakan petani AMANAT? (2) Sejauh mana tingkat solidaritas anggota

gerakan petani AMANAT dilihat dari tinjauan *diagnostic, prognostic, dan motivational framing*? (3) Bagaimana pengaruh gerakan petani AMANAT terhadap trajektori perjuangan reforma agraria, dengan fokus kebijakan pertanahan pro-kaum miskin dan perubahan struktur penguasaan tanah di Desa Cisarua. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian gerakan sosial dan kebijakan reforma agraria di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan inspirasi bagi gerakan petani lain dalam memperjuangkan hak agraria serta menjadi masukan konstruktif bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan pertanahan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

## **PENDEKATAN TEORITIS**

### **Reforma Agraria**

Reforma agraria merupakan konsep yang berkembang sebagai jawaban terhadap ketimpangan struktur agraria yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pengertian sempit, reforma agraria dapat diartikan sebagai redistribusi tanah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan dalam struktur penguasaan tanah. Menurut Sihalo (2004), struktur agraria tidak sekadar menggambarkan pola distribusi tanah, melainkan juga merefleksikan relasi sosial-ekonomi dan kekuasaan di antara berbagai kelompok yang terkait langsung dengan sumber-sumber agraria. Oleh karena itu, struktur agraria mencerminkan kondisi sosial dan politik dari suatu masyarakat secara lebih luas.

Dalam perspektif yang lebih komprehensif, reforma agraria mencakup dua komponen utama, yaitu *asset reform* dan *access reform* (Shohibuddin & Salim, eds, 2012). *Asset reform* adalah proses redistribusi kepemilikan lahan dari kelompok pemilik tanah yang luas ke petani atau masyarakat kecil yang tidak memiliki tanah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya petani gurem atau tanpa tanah, dapat memiliki hak yang sah dan aman atas tanah pertanian. Di sisi lain, *access reform* adalah upaya lebih luas yang mencakup berbagai inisiatif pembangunan yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan memastikan aset tanah yang telah didistribusikan dapat dikelola secara produktif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup akses terhadap modal, teknologi pertanian, infrastruktur, pelatihan, dan pasar. Reforma agraria dalam arti luas ini diharapkan mampu secara efektif mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi petani dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan (Syahyuti, 2004; Wiradi, 2009).

Keberhasilan reforma agraria tidak hanya bergantung pada aspek teknis redistribusi tanah saja, tetapi juga memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah serta modal sosial (*social capital*) yang tinggi dalam masyarakat. Komitmen politik pemerintah yang tegas sangat menentukan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan petani kecil, termasuk perlindungan hukum dan jaminan keberlanjutan pengelolaan tanah redistribusi. Di sisi lain, modal sosial mencakup kekuatan solidaritas dan kapasitas organisasi masyarakat yang memungkinkan petani untuk secara kolektif memperjuangkan hak-haknya, melakukan pengelolaan lahan secara produktif, dan menghadapi tantangan yang muncul dalam proses reforma agraria.

Wiradi (2009) menegaskan bahwa terdapat empat faktor utama yang menentukan keberhasilan reforma agraria, yakni: (1) kemauan politik dari elite politik untuk secara sungguh-sungguh menjalankan reforma agraria; (2) terpisahnya elite politik dan birokrasi pemerintahan dari kepentingan bisnis yang berpotensi memengaruhi kebijakan agraria demi keuntungan pihak swasta; (3) adanya partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat, terutama organisasi petani, untuk mengawal pelaksanaan reforma agraria secara transparan dan akuntabel; serta (4) tersedianya data dasar agraria yang lengkap dan valid sebagai basis pengambilan keputusan. Untuk konteks Indonesia saat ini, keempat prasyarat tersebut masih lemah yang menyebabkan lemahnya implementasi reforma agraria secara nasional (Wiradi, 2009). Akibatnya, meski berbagai kebijakan reforma agraria telah diinisiasi, implementasi di lapangan masih banyak hambatan. Karena itu, penelitian mendalam mengenai peran dan dinamika gerakan petani menjadi penting untuk menilai bagaimana tindakan kolektif petani dapat memperkuat posisi politik mereka dalam perjuangan reforma agraria yang lebih adil dan inklusif.

### **Gerakan Petani dan Dinamikanya**

Gerakan petani adalah salah satu bentuk gerakan sosial yang muncul sebagai respons terhadap berbagai ketimpangan dan ketidakadilan dalam konteks agraria. Untuk memahami gerakan petani ini secara lebih mendalam, konsep pembingkai kolektif (*collective framing*) sangat relevan untuk digunakan. Konsep

ini secara mendasar menjelaskan bagaimana individu atau kelompok melakukan interpretasi kolektif terhadap situasi sosial yang mereka alami, serta bagaimana interpretasi ini mendorong mereka bertindak secara kolektif dalam memperjuangkan perubahan sosial (Tarrow, 1998). Pembingkai kolektif ini berfungsi sebagai mediator antara peluang politik yang tersedia dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh kelompok petani dalam gerakan sosial.

Menurut Benford & Snow (2000), pembingkai kolektif dalam gerakan sosial meliputi tiga kategori penting, yaitu *diagnostic*, *prognostic*, dan *motivational framing*. Pembingkai diagnostik adalah proses di mana anggota gerakan sosial secara kolektif mengidentifikasi permasalahan mendasar yang mereka hadapi, sekaligus menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut. Dengan kata lain, pembingkai diagnostik membantu petani memahami akar ketidakadilan yang mereka alami sehingga memungkinkan mereka untuk mengarahkan tindakan kolektif secara lebih terarah dan efektif. Pembingkai prognostik kemudian membantu anggota gerakan sosial dalam merancang solusi praktis, merumuskan strategi, dan menentukan langkah-langkah aksi yang perlu diambil untuk menghadapi permasalahan tersebut. Pembingkai ini memberikan panduan yang jelas mengenai tindakan apa yang harus dilakukan agar tujuan gerakan dapat tercapai. Pembingkai motivasional, di sisi yang lain, adalah proses pembentukan narasi, jargon, dan motivasi kolektif yang bertujuan meningkatkan keterlibatan anggota dalam gerakan sosial. Melalui pembingkai ini, individu dan kelompok menemukan alasan kuat untuk terlibat aktif dalam perjuangan bersama, misalnya dengan menekankan pentingnya menjaga sumber penghidupan dan mempertahankan hak atas tanah sebagai aset utama kehidupan petani.

Selain konsep pembingkai kolektif, kajian tentang gerakan sosial petani juga dapat diperkaya melalui pengkategorian aktor dalam gerakan sosial sebagaimana dikemukakan oleh McCarthy dan Zald (1977). Keduanya mengklasifikasikan posisi para aktor dalam gerakan sosial ke dalam lima kategori: *adherents* (simpatisan), *constituents* (pendukung aktif), *bystanders* (penonton netral), *opponent* (penentang), dan *constituents potential* (calon pendukung potensial). Dalam konteks organisasi AMANAT, tiga kategori aktor gerakan akan diidentifikasi. Pertama adalah *adherents*, yaitu anggota AMANAT yang mempercayai dan mendukung tujuan gerakan, namun tidak selalu memberikan sumber daya secara langsung. Kedua adalah *constituents*, yaitu anggota AMANAT yang tidak hanya percaya terhadap tujuan gerakan tetapi juga memberikan dukungan sumber daya secara nyata dalam berbagai bentuk seperti dana, tenaga, dan waktu. Ketiga adalah *bystanders*, yaitu anggota AMANAT yang tidak terlibat aktif dan cenderung tidak mengambil posisi tegas terhadap perjuangan gerakan sosial yang berlangsung, namun turut menikmati hasil perjuangannya.

Dengan menggunakan perspektif pembingkai kolektif dan pengkategorian aktor sosial seperti di atas, analisis terhadap gerakan petani akan menjadi lebih jelas dalam memahami dinamika internal organisasi, motivasi anggota, serta kekuatan solidaritas yang mampu mendorong kesuksesan perjuangan reforma agraria. Oleh karena itu, konsep-konsep ini sangat penting dimanfaatkan untuk memahami secara lebih komprehensif bagaimana organisasi petani seperti AMANAT dapat mengartikulasikan tuntutan mereka, memobilisasi aksi-aksi kolektif yang efektif, serta menciptakan solidaritas internal yang tinggi guna memperjuangkan reforma agraria yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

### ***Pro-Poor Land Governance***

Dalam rangka mengevaluasi sejauh mana reforma agraria dapat memenuhi kepentingan petani, penting untuk memahami secara mendalam trajektori perjuangan reforma agraria yang sedang berlangsung. Kajian ini harus memperhatikan secara khusus sejauh mana kebijakan reforma agraria yang diterapkan mampu memenuhi dan melindungi kepentingan petani kecil. Dalam rangka ini, selain berdasarkan pada perbaikan struktur penguasaan tanah, evaluasi juga perlu melihat sejauh mana kebijakan reforma agraria dapat berpihak kepada kelompok miskin (*pro-poor land governance*). Menurut Borras & Franco (2010), kebijakan pertanahan yang memihak kaum miskin didefinisikan sebagai kebijakan publik yang secara eksplisit bertujuan untuk melindungi serta meningkatkan akses dan kepemilikan tanah bagi kelompok masyarakat miskin, khususnya petani kecil. Kebijakan tersebut tidak sekadar menjamin distribusi tanah, tetapi juga memastikan bahwa kaum miskin memiliki akses terhadap sumber daya alam serta berbagai manfaat sosial-ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan lahan tersebut.

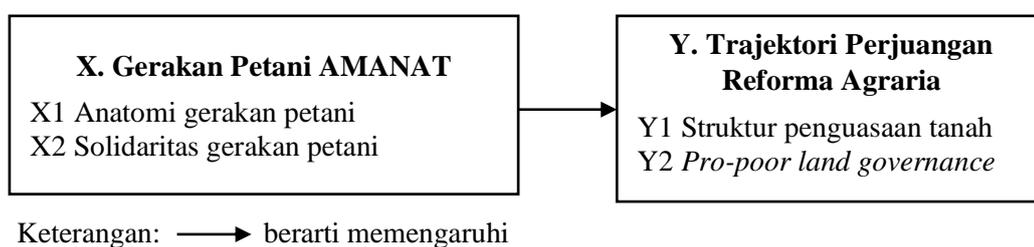
Secara lebih spesifik, kebijakan *pro-poor* harus mampu menjamin bahwa redistribusi aset tanah diikuti oleh dukungan akses yang memadai terhadap sumber daya produksi lainnya, seperti modal, teknologi, sarana pertanian, pendidikan, serta jaminan pasar yang stabil bagi hasil produksi petani kecil. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya berhenti pada tahap redistribusi tanah, tetapi juga mencakup upaya-upaya yang lebih luas untuk memastikan keberlanjutan akses petani terhadap manfaat ekonomi dan

sosial yang lebih besar. Implementasi kebijakan ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi petani, lembaga masyarakat sipil, sektor swasta dan perguruan tinggi dalam suatu kerangka kebijakan terpadu yang berpihak pada petani kecil.

Borras & Franco (2010) menekankan bahwa kebijakan pertanahan baru dapat disebut *pro-poor* apabila mencakup elemen perlindungan yang jelas terhadap petani kecil dari risiko pengusuran dan eksploitasi oleh kekuatan ekonomi besar, sekaligus mempromosikan redistribusi manfaat ekonomi berbasis sumber daya alam kepada kelompok marginal. Dengan demikian, kebijakan pertanahan yang berpihak kepada kelompok miskin akan dapat mencapai tujuan akhir reforma agraria, yaitu keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan pengelolaan sumber-sumber agraria secara inklusif.

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian literatur yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana dinamika gerakan petani AMANAT dapat menimbulkan pengaruh atas hasil dan arah dari perjuangan reforma agraria. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh anatomi gerakan petani terhadap trajektori perjuangan reforma agraria. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah pengaruh tingkat solidaritas petani terhadap trajektori perjuangan reforma agraria.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Seperti dapat dilihat, kerangka pemikiran dalam penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang jelas mengenai keterkaitan antara dinamika internal dan eksternal gerakan sosial petani dengan capaian reforma agraria yang diharapkan.

### Hipotesis

Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari anatomi dan solidaritas gerakan petani terhadap trajektori perjuangan reforma agraria.

### PENDEKATAN LAPANGAN

#### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed-method*), yakni pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 30 responden dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data. Responden dipilih secara *probability sampling* di antara petani Desa Cisarua yang sejak awal menjadi anggota AMANAT melalui teknik *simple random sampling*. Sementara data kualitatif diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para informan kunci.

#### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan dua pertimbangan utama. Pertama, Desa Cisarua adalah salah satu dari tiga desa di Kecamatan Nanggung yang menjadi lokasi konflik terkait tanah eks-HGU PT. Hevindo. Kedua, Desa Cisarua adalah desa dengan jumlah lahan garapan terbesar di lokasi eks-HGU PT. Hevindo, dengan total 535 bidang lahan yang dikelola oleh 379 petani anggota AMANAT.

Pengumpulan data penelitian berlangsung dari bulan Juli hingga Desember 2020.

#### Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data dalam penelitian ini mencakup data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dari survei diolah menggunakan Microsoft Excel 2013 dan dianalisis dengan aplikasi SPSS 16.0 serta Smart

PLS 3.0. Analisis data kuantitatif dilakukan melalui tabel frekuensi, tabel tabulasi silang, serta pengujian hipotesis menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varians, yaitu metode *Partial Least Square* (PLS).

Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Tahap reduksi data melibatkan seleksi dan penyederhanaan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen ke dalam tulisan tematik yang relevan dengan fokus penelitian. Data ini selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi yang jelas dan mudah dipahami. Tahap terakhir, yakni verifikasi, merupakan proses penarikan kesimpulan dari hasil analisis kualitatif untuk memperkuat temuan kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Anatomi Gerakan Petani

Peristiwa perusakan dan pembakaran tanaman petani oleh PT Hevindo pada 2013 telah memicu konflik serius antara perusahaan dengan petani penggarap. Peristiwa ini kemudian mendorong para petani untuk melakukan perlawanan terorganisir dengan membentuk Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif (AMANAT). Mengacu pada klasifikasi organisasi petani menurut Mustain (2007), AMANAT termasuk dalam kategori organisasi yang muncul secara organik dari pergulatan internal petani itu sendiri, sebagai respons langsung atas konflik yang dihadapi.

Embrio pembentukan organisasi AMANAT berawal pada tahun 2011 ketika para petani berkonsolidasi dan membentuk Paguyuban Petani Nanggung (PATEN). Organisasi ini adalah gabungan kelompok petani di lingkup Kecamatan Nanggung dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan mengupayakan penyelesaian konflik dengan pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Akan tetapi, ketika konflik terkait lahan eks-HGU kian memanas, dibentuklah organisasi AMANAT dengan fokus memperjuangkan hak penguasaan tanah di lahan bekas perkebunan ini. AMANAT berfungsi sebagai wadah perjuangan kolektif bagi petani penggarap lahan eks-HGU di tiga desa, yaitu Desa Nanggung, Curug Bitung, dan Cisarua. AMANAT memiliki sekretariat berupa saung yang berlokasi di Desa Nanggung yang dibangun secara swadaya oleh para petani. Struktur kepengurusan AMANAT terdiri dari Ketua Umum (Ketum), Sekretaris Jenderal (Sekjen), dan tiga Koordinator Desa (Kordes) yang masing-masing bertanggung jawab atas wilayah desa masing-masing. Selain itu, setiap desa memiliki beberapa koordinator kampung yang bertugas mengorganisir petani di tingkat lokal.

Dengan demikian, terbentuknya AMANAT tidak hanya menjadi wadah perjuangan bersama bagi petani, tetapi juga menciptakan struktur organisasi yang jelas dan mampu memobilisasi solidaritas petani secara efektif dalam menghadapi konflik agraria yang berlangsung. Hal ini menjadi landasan penting dalam perjuangan reforma agraria yang berpihak pada kepentingan petani kecil di wilayah tersebut.

Menurut data dari JKPP, petani penggarap di lokasi eks-HGU PT. Hevindo mencapai 812 orang dengan total lahan garapan seluas 226,3 hektare. Total luasan ini terbagi ke dalam 1.066 bidang yang terdiri dari 1.024 bidang garapan petani dan 42 bidang fasilitas umum dan sosial. Jumlah luasan ini masih lebih kecil dari total luas lahan eks-HGU yang mencapai 310 hektare. Mayoritas penggarap adalah laki-laki (77%) dibandingkan perempuan (23%). Desa Cisarua mempunyai proporsi petani penggarap terbesar dibanding dua desa lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Jumlah dan persentase subjek dan objek redistribusi tanah di Desa Cisarua dibandingkan total, tahun 2020

Subjek dan Objek	Desa Cisarua		Total Tiga Desa	
	n	%	n	%
Jumlah Petani Penggarap	379	74	512	100
Jumlah Total Bidang	535	50,2	1.066	100
Jumlah Bidang Garapan petani	520	50,8	1.024	100
Jumlah Bidang Fasum-Fasos	15	35,7	42	100
Luas Total Bidang (Ha)	119,2	52,7	226,3	100

Sumber: Data Pemetaan Partisipatif JKPP

Berdasarkan data pada Tabel 1, Desa Cisarua memiliki jumlah petani penggarap terbanyak sebesar 74 persen serta jumlah bidang tanah terbanyak sebesar 50,2 persen. Jumlah bidang garapan petani paling banyak juga terdapat di Desa Cisarua sebesar 50,8 persen, demikian pula jumlah bidang fasum dan fasos

yang mencapai 52,3 persen juga terdapat di desa ini. Luas total bidang tanah paling besar juga terdapat di Desa Cisarua, yaitu seluas 119,2 Ha. Meskipun demikian, rata-rata luas tanah yang dikuasai petani didominasi oleh kategori gurem (kurang dari 0,5 hektare) yang mencapai 83,3%, sementara sisanya (16,7%) adalah kategori kecil, yaitu antara 0,5-1,99 hektare (lihat Tabel 2 hingga 5 di bawah).

Saat ini, organisasi petani AMANAT menempatkan advokasi kebijakan dan perjuangan reforma agraria sebagai fokus utama kegiatannya. Dengan fokus ini, AMANAT telah memainkan peran strategis dalam mengorganisir aksi kolektif petani demi memastikan pemenuhan hak atas tanah eks HGU PT. Hevindo. Fokus tersebut memungkinkan AMANAT untuk berkonsentrasi secara penuh dalam memperjuangkan kepentingan politik para petani di tengah kompleksitas konflik agraria yang mereka hadapi. Berbagai kegiatan penguatan kapasitas anggota organisasi hingga saat ini pun cenderung diarahkan pada aspek-aspek yang relevan dengan advokasi agraria, seperti pelatihan terkait pemahaman hukum, hak atas tanah, strategi negosiasi, serta upaya membangun jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Namun, fokus pada advokasi reforma agraria ini menyebabkan AMANAT belum mampu secara optimal menjalankan peran sebagai wadah pengembangan keterampilan pertanian yang lebih praktis bagi para anggotanya. Sebagian besar petani yang tergabung dalam AMANAT hingga kini hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan bertani yang diperoleh secara otodidak, tanpa dukungan penyuluhan pertanian yang memadai atau pelatihan teknis secara formal. Ketiadaan pendampingan ini tentunya menimbulkan keterbatasan dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, meskipun perjuangan dalam hal penguasaan tanah telah menunjukkan kemajuan.

Para pengurus AMANAT telah menyadari pentingnya pengembangan kapasitas pertanian anggotanya sebagai bagian integral dari perjuangan reforma agraria yang lebih luas. Mereka memiliki visi jangka panjang yang jelas, yaitu bahwa organisasi ini tidak akan berhenti sekalipun perjuangan hak atas tanah telah selesai. Sebaliknya, AMANAT akan melakukan transformasi organisasi dari yang semula hanya berfokus pada advokasi reforma agraria, menuju organisasi petani yang lebih luas perannya. Pada tahap tersebut, AMANAT akan menjadi wadah bagi anggotanya untuk mengembangkan kapasitas pertanian, termasuk melalui pelatihan teknis budidaya, penyuluhan pertanian, peningkatan akses terhadap sarana produksi, hingga penguatan kapasitas manajemen dan kewirausahaan pertanian.

Rencana transformasi tersebut adalah langkah strategis bagi masa depan AMANAT serta kesejahteraan petani anggotanya. Ketika organisasi AMANAT berhasil menjalankan peran pengembangan kapasitas petani secara optimal, maka akan terbentuk sinergi antara redistribusi tanah (*asset reform*) dan penguatan akses produktif (*access reform*). Hal ini sejalan dengan prinsip reforma agraria sejati, yang tidak hanya memberikan tanah kepada petani, tetapi juga memastikan agar petani mampu mengelola tanahnya secara produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, petani akan mampu memperoleh manfaat ekonomi, sosial, serta ekologi secara berkelanjutan.

### **Solidaritas Gerakan Petani**

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan organisasi gerakan petani adalah tingkat solidaritas yang terbangun di dalamnya, baik dalam hubungan vertikal antara pemimpin dan anggota maupun hubungan horizontal antaranggota. Solidaritas ini menjadi faktor penentu dalam efektivitas perjuangan organisasi, terutama dalam menghadapi tekanan pihak eksternal seperti perusahaan HGU atau kebijakan pemerintah yang tidak memihak petani. Tingkat solidaritas dalam suatu organisasi gerakan petani dapat dinilai dari bagaimana anggotanya membingkai perjuangan mereka, serta bagaimana mereka memosisikan diri dalam struktur organisasi yang mereka ikuti.

Dalam konteks gerakan petani AMANAT, solidaritas organisasi dapat dikaji melalui konsep *collective framing* (pembingkai kolektif) yang ditulis oleh Benford & Snow (2000). Mereka mengklasifikasikan pembingkai dalam gerakan sosial ke dalam tiga kategori, yaitu pembingkai diagnostik, prognostik, dan motivasional. Pembingkai pertama berkaitan dengan sejauh manakah anggota AMANAT mampu mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi dan memahami akar penyebabnya. Pembingkai prognostik mengacu pada bagaimana mereka merumuskan solusi dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Sementara pembingkai ketiga berhubungan dengan cara organisasi membangun semangat dan mendorong anggotanya untuk terus terlibat aktif dalam gerakan.

Berdasarkan data yang diperoleh, semua responden menunjukkan tingkat pembingkai diagnostik yang tinggi (Tabel 2). Hal ini berarti mereka mempunyai pemahaman yang jelas terhadap masalah agraria yang dihadapi, serta akar penyebab utama dari masalah tersebut. Semua anggota AMANAT tanpa terkecuali memiliki kesadaran bahwa ketimpangan agraria dan ketidakpastian hak atas tanah bukan peristiwa yang

terjadi secara alamiah, akan tetapi merupakan perwujudan dari ketidakadilan struktural yang mereka hadapi secara langsung. Kesadaran ini tidak hanya memperkuat rasa solidaritas di antara mereka, akan tetapi juga meningkatkan kesiapan mereka dalam mengorganisir perlawanan dan aksi kolektif yang lebih terarah.

**Tabel 2.** Tingkat pembingkai diagnostik petani menurut luas penguasaan tanah di Desa Cisarua, tahun 2020

<i>Pembingkai Diagnostik</i>	<b>Kategori Petani Menurut Luas Penguasaan Tanah</b>				<b>Total</b>	
	<b>Skala Gurem</b>		<b>Skala Kecil</b>		<b>n</b>	<b>%</b>
	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>		
Tinggi	25	83,3	5	16,7	30	100
Sedang	0	0	0	0	0	0
Rendah	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>83,3</b>	<b>5</b>	<b>16,7</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Keberhasilan dalam pembingkai diagnostik ini berpengaruh besar pada efektivitas gerakan AMANAT dalam mengorganisir aksi-aksi perjuangan. Dengan pemahaman yang kuat terhadap ketidakadilan yang mereka alami, para petani mampu memobilisasi sumber daya mereka dengan lebih efisien, memastikan bahwa setiap aksi yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan berdampak maksimal. Dalam konteks ini, gerakan AMANAT tidak hanya bersifat reaktif dalam merespons konflik agraria yang mereka alami, akan tetapi juga mampu membangun strategi jangka panjang yang berbasis pada kesadaran kolektif dan kekuatan solidaritas anggotanya. Seperti akan dijelaskan di bawah, kapasitas pembingkai diagnostik ini menjadi modal utama dalam memastikan keberlanjutan perjuangan mereka, serta dalam membangun strategi advokasi yang lebih sistematis dan terarah.

Indikator berikutnya untuk menilai tingkat solidaritas gerakan petani AMANAT adalah pembingkai prognostik yang terkait dengan kemampuan menemukan solusi atas masalah atau rencana menghadapi masalah sekaligus strategi untuk melakukannya. Sebaran responden dalam hal pembingkai prognostik ini dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Tingkat pembingkai prognostik petani menurut luas penguasaan tanah di Desa Cisarua, tahun 2020

<i>Pembingkai Prognostik</i>	<b>Kategori Petani Menurut Luas Penguasaan Tanah</b>				<b>Total</b>	
	<b>Skala Gurem</b>		<b>Skala Kecil</b>		<b>n</b>	<b>%</b>
	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>		
Tinggi	21	70	5	16,7	26	86,7
Sedang	4	13,3	0	0	4	13,3
Rendah	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>83,3</b>	<b>5</b>	<b>16,7</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Berdasarkan data pada Tabel 3, dominannya responden yang memiliki tingkat pembingkai prognostik yang tinggi (86,7%) menunjukkan kemampuan mereka merumuskan strategi konkret upaya penyelesaian masalah yang telah mereka identifikasi. Dengan kata lain, mereka tidak hanya memahami ketidakadilan agraria yang terjadi, tetapi juga memiliki strategi yang jelas dalam mengadvokasi perubahan kebijakan yang diinginkan. Yang terakhir ini mencakup penolakan atas perpanjangan HGU PT Hevindo, advokasi kebijakan ke Pemerintah Kabupaten dan BPN, serta menggalang aliansi LSM dan dukungan Komnas HAM dalam rangka memperkuat posisi mereka. Selain itu, mereka melakukan pendataan subjek dan objek tanah garapan guna memperjelas legitimasi tuntutan mereka untuk pelaksanaan reforma agraria. Tidak hanya berjuang di ranah kebijakan, petani AMANAT juga terus menggarap tanah eks-HGU sebagai bukti pemanfaatan lahan untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Pendekatan yang berbasis advokasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pengelolaan lahan secara produktif menjadikan perjuangan AMANAT lebih sistematis dan terarah. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan petani tidak hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi aktor yang strategis dalam mendorong pelaksanaan kebijakan reforma agraria yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.

Akhirnya, indikator ketiga dalam menilai tingkat solidaritas gerakan AMANAT adalah pembingkai motivasional yang terkait dengan alasan-alasan yang mendorong partisipasi petani dalam gerakan sosial

untuk mengubah struktur agraria yang dianggap tidak adil. Hal ini mencakup penciptaan narasi, slogan, dan jargon yang dapat memperkuat semangat perjuangan serta memotivasi anggota untuk tetap terlibat aktif dalam tindakan kolektif mendorong pelaksanaan reforma agraria. Pada Tabel 4 dapat dilihat sebaran responden dalam hal pembingkai motivasi ini.

**Tabel 4.** Tingkat pembingkai motivasi petani menurut luas penguasaan tanah di Desa Cisarua, tahun 2020

Pembingkai Motivasi	Kategori Petani Menurut Luas Penguasaan Tanah				Total	
	Skala Gurem		Skala Kecil		n	%
	n	%	n	%		
Tinggi	20	66,7	5	16,7	25	83,4
Sedang	5	16,7	0	0	5	16,7
Rendah	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>83,3</b>	<b>5</b>	<b>16,7</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Tabel 4 menunjukkan mayoritas responden (83,4%) menunjukkan tingkat pembingkai motivasi yang tinggi, sementara 16,7% responden berada pada tingkat sedang. Tingginya tingkat pembingkai motivasi ini mencerminkan kuatnya dorongan bagi petani AMANAT untuk terus berjuang, terutama dalam mempertahankan tanah sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Motivasi yang kuat ini tidak hanya memperteguh tekad individu tetapi juga memperkuat solidaritas kolektif dalam gerakan mereka.

Berdasarkan hasil analisis atas kapasitas pembingkai yang dimiliki oleh responden, dapat disimpulkan bahwa para petani AMANAT memiliki tingkat pembingkai aksi kolektif yang tinggi di semua aspek: pembingkai diagnostik (identifikasi masalah), prognostik (perumusan solusi), dan motivasi (dorongan aksi). Sinergi ketiga aspek ini berkontribusi positif terhadap keberlanjutan gerakan petani dan memperkuat pengaruh mereka dalam perjuangan reforma agraria yang lebih luas.

Selain berdasarkan analisis *framing* dalam aksi kolektif, solidaritas petani juga dapat dikaji berdasarkan klasifikasi peran aktor dalam gerakan sosial. Tingkat solidaritas gerakan yang tinggi tercapai ketika setiap anggota menempatkan dirinya secara positif dalam organisasi dan memiliki kesamaan tujuan dengan mayoritas anggota lainnya. McCarthy dan Zald (1977) mengelompokkan aktor gerakan sosial ke dalam kategori *adherents*, yakni aktor yang mendukung tujuan gerakan; *constituents*, yakni aktor yang tidak sekedar mendukung tetapi juga berkontribusi dengan sumber daya; dan *bystanders*, yang bersikap netral tanpa keterlibatan aktif. Distribusi responden menurut tiga kategori aktor ini dapat dilihat pada Tabel 5, yang menggambarkan tingkat partisipasi dan keterlibatan petani dalam perjuangan AMANAT.

**Tabel 5.** Kategori aktor gerakan petani menurut luas penguasaan tanah di Desa Cisarua, tahun 2020

Kategori Aktor Gerakan Petani	Kategori Petani Menurut Luas Penguasaan Tanah				Total	
	Skala Gurem		Skala Kecil		n	%
	n	%	n	%		
<i>Adherents</i> (simpatisan)	19	63,3	5	16,7	24	80
<i>Constituents</i> (pendukung aktif)	6	20	0	0	6	20
<i>Bystanders</i> (calon pendukung)	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>83,3</b>	<b>5</b>	<b>16,7</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Berdasarkan data pada Tabel 5, mayoritas petani AMANAT (80%) termasuk dalam kategori *adherents* yang berarti mereka secara aktif bergabung dan berjuang dalam organisasi karena memiliki keyakinan kuat bahwa tujuan AMANAT selaras dengan kepentingan mereka. Tingginya jumlah *adherents* ini mencerminkan kuatnya solidaritas dalam organisasi, di mana petani tidak hanya merasa menjadi bagian dari gerakan, tetapi juga yakin bahwa perjuangan kolektif dapat menghasilkan perubahan nyata dalam hak kepemilikan tanah mereka. Keyakinan ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan gerakan serta meningkatkan komitmen anggota untuk tetap terlibat dalam berbagai aksi dan advokasi.

Sementara itu, sebanyak 20% petani tergolong dalam kategori *constituents* yang berarti mereka tidak sekedar mendukung secara ideologis, tetapi juga berkontribusi dengan memberikan sumber daya bagi organisasi. Dukungan ini bisa berupa tenaga, waktu, atau bantuan material yang memperkuat perjuangan AMANAT. Kehadiran kelompok *constituents* ini menunjukkan bahwa AMANAT adalah organisasi yang bersifat swadaya dan memiliki kapasitas untuk membangun ketahanan internal tanpa terlalu bergantung

pada aktor eksternal. Sinergi antara *adherents* dan *constituents* dalam gerakan AMANAT menciptakan ekosistem gerakan yang solid, di mana ada keseimbangan antara keterlibatan ideologis dan dukungan praktis. Hal ini menjadikan AMANAT sebagai organisasi petani yang mandiri dalam memperjuangkan reforma agraria.

### Pengaruh Gerakan Petani terhadap *Pro-Poor Land Governance*

Gerakan petani AMANAT telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dalam memperjuangkan hak atas tanah eks-HGU PT. Hevindo. Dalam perjalanannya, perjuangan ini mengalami berbagai dinamika, khususnya dalam kaitannya dengan *pro-poor land governance* atau kebijakan pertanahan yang berpihak pada petani yang termasuk kategori kelompok miskin. Sejak awal, AMANAT berkomitmen memastikan tanah eks-HGU tersebut dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh petani miskin dan tak bertanah. Meskipun secara legal reforma agraria yang mereka perjuangkan belum sepenuhnya terwujud (sertifikat tanah belum kunjung diterbitkan pemerintah), AMANAT telah mencapai berbagai kemajuan yang signifikan yang memperkuat posisi mereka dalam mendorong kebijakan pertanahan yang lebih adil.

Pada intinya, konsep *pro-poor land governance* berfokus pada bagaimana kebijakan pertanahan dapat memastikan akses dan perlindungan bagi kelompok petani miskin atas tanah. Relasi antara gerakan petani dan aktor reformis pemerintah menjadi faktor utama dalam menjamin hak petani atas tanah serta manfaat sosial-ekonomi yang menyertainya. Dalam kaitan ini, Borras & Franco (2010) mengemukakan bahwa kebijakan pertanahan yang berpihak pada kaum miskin harus berorientasi pada perlindungan hak kepemilikan tanah serta redistribusi kekayaan berbasis tanah agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan politik kelompok marginal.

Untuk menganalisis pengaruh anatomi dan solidaritas gerakan AMANAT terhadap trajektori perjuangan reforma agraria (dilihat dari sejauh mana struktur agraria mencerminkan keberpihakan pada kelompok miskin), penelitian ini melakukan beberapa pengujian statistik di antaranya uji *path coefficient* dan uji hipotesis menggunakan uji *t-statistic* dan uji *p-values*. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji arah serta signifikansi pengaruh antara variabel-variabel gerakan petani terhadap trajektori perjuangan reforma agraria. Berdasarkan hasil uji SmartPLS, didapatkan hasil uji *path coefficient* sebesar 0,720. Hasil ini menggambarkan bahwa hubungan antara variabel gerakan petani dengan trajektori penguasaan tanah yang berpihak pada kelompok miskin kuat dan memiliki arah yang positif (searah) karena mendekati nilai +1.

**Tabel 6.** Hasil uji *path coefficient* variabel gerakan petani terhadap variabel trajektori penguasaan tanah yang berpihak pada kelompok miskin

	Trajektori Perjuangan Reforma Agraria (Y)
Gerakan Petani (X)	0,720

Kemudian pada pengujian *t-statistic* didapatkan hasil sebesar 7,889. Hal tersebut menandakan bahwa gerakan petani memberikan pengaruh yang signifikan terhadap trajektori perjuangan reforma agraria yang dicirikan oleh penguasaan tanah yang berpihak pada kelompok miskin. Lalu pada hasil uji *p-values* didapatkan hasil sebesar 0,000 yang berarti gerakan petani memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penguasaan tanah yang pro kelompok miskin sebagai trajektori dari perjuangan reforma agraria yang dijalankan.

**Tabel 7.** Hasil uji *path t-statistic* dan *p-values* variabel gerakan petani terhadap variabel trajektori penguasaan tanah yang berpihak pada kelompok miskin

	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Gerakan Petani (X) → Trajektori Perjuangan Reforma Agraria (Y)	7,889	0,000

Berdasarkan hasil dari ketiga pengujian tersebut, variabel gerakan petani memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel trajektori perjuangan reforma agraria, khususnya dalam memastikan penguasaan tanah yang berpihak pada petani miskin. Berdasarkan uji statistik, hipotesis mengenai hubungan positif dan signifikan antara anatomi serta solidaritas gerakan petani dengan trajektori perjuangan reforma agraria dapat diterima. Dengan kata lain, semakin kuat organisasi dan solidaritas AMANAT, semakin besar kemampuannya dalam memengaruhi arah kebijakan reforma agraria yang lebih inklusif.

Selama lebih dari satu dekade, AMANAT memang telah berhasil membangun jejaring dengan berbagai aliansi pendukung, baik di tingkat lokal maupun nasional. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi yang diterapkan pengurus dan anggota AMANAT dalam menggagalkan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti LSM, perguruan tinggi dan lembaga advokasi agraria. Seiring peningkatan kapasitas anggota AMANAT melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh aliansi pendukung, mereka dapat dengan cepat beradaptasi dan memanfaatkan keterampilan baru dalam memperkuat perjuangan mereka. Hal ini memungkinkan AMANAT untuk memperluas pengaruhnya, tidak hanya di tingkat desa, tetapi juga di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Di tingkat desa, relasi AMANAT yang baik dengan pemerintah desa telah membuka akses bagi petani untuk memperoleh kepastian hak secara *de facto* atas tanah yang mereka garap. Pemerintah desa bahkan mendukung alokasi tanah terlantar di lokasi eks-HGU kepada kelompok pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna. Kebijakan pemerintah desa ini memungkinkan generasi muda untuk terlibat aktif dalam pertanian dan memastikan keberlanjutan usaha tani di Desa Cisarua.

Di tingkat kecamatan, AMANAT mendapat dukungan dari Camat Kecamatan Nanggung dalam upaya memperjuangkan redistribusi tanah. Pada skala kabupaten, gerakan AMANAT juga berkontribusi dalam menggagalkan perpanjangan HGU PT. Hevindo, yang memungkinkan tanah tetap dikelola oleh petani. Melalui tekanan politik berupa demonstrasi hingga lobby di tingkat kabupaten, AMANAT juga berhasil memperoleh dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dengan merekomendasikan kepada Menteri ATR/BPN untuk menjalankan redistribusi tanah kepada petani penggarap di lokasi eks-HGU PT Hevindo.

Di tingkat nasional, gerakan AMANAT berhasil membawa agenda perjuangan agraria mereka masuk ke dalam prioritas penyelesaian konflik agraria. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam menjamin bahwa tanah yang diperjuangkan benar-benar dialokasikan kepada petani yang berhak.

Keberhasilan gerakan AMANAT dalam memanfaatkan berbagai peluang politik dan menjalin interaksi dengan aktor-aktor reformis di berbagai tingkatan pemerintahan merupakan bukti atas tingkat eksistensi dan solidaritas gerakan petani ini yang cukup kuat. Pada gilirannya, hal ini menjadi faktor utama dalam mendorong pelaksanaan reforma agraria yang sejalan dengan prinsip-prinsip *pro-poor land governance* demi mengupayakan kebijakan pertanahan yang inklusif dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis peran gerakan petani AMANAT dalam menentukan trajektori perjuangan reforma agraria di Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dengan menjawab tiga pertanyaan penelitian utama, temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang (1) anatomi gerakan AMANAT, (2) tingkat solidaritas dalam organisasi, dan (3) pengaruhnya terhadap kebijakan reforma agraria khususnya menyangkut struktur penguasaan tanah yang bersifat inklusif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMANAT beroperasi sebagai gerakan petani yang terorganisir dengan baik, memiliki solidaritas internal yang kuat, dan memiliki kapasitas pembingkai diagnostik, prognostik, dan motivasional yang tinggi. Gerakan ini berhasil memobilisasi aksi kolektif, membangun aliansi dengan LSM dan pemerintah, serta menggagalkan perpanjangan izin HGU PT. Hevindo. Melalui advokasinya, AMANAT telah berkontribusi dalam mendorong perwujudan *pro-poor land governance*, yaitu dengan memastikan bahwa kebijakan redistribusi tanah berpihak kepada petani miskin.

Hasil uji statistik mengonfirmasi adanya hubungan positif dan signifikan antara gerakan petani AMANAT dan trajektori perjuangan reforma agraria. Hal ini menegaskan bahwa mobilisasi akar rumput memiliki pengaruh nyata dalam memperjuangkan hak atas tanah. Interaksi AMANAT dengan berbagai aktor reformis pada berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari desa hingga BPN, membuktikan bahwa gerakan petani yang terorganisir dapat memberi warna terhadap arah kebijakan reforma agraria.

Namun demikian, AMANAT masih menghadapi banyak tantangan dalam memperluas perannya di luar advokasi. Saat ini perjuangan untuk kepastian hak petani atas tanah mulai menunjukkan “angin segar” dengan keluarnya surat rekomendasi Bupati Bogor kepada Kementerian ATR/BPN untuk menjalankan reforma agraria di lokasi eks-HGU PT Hevindo. Seiring dengan ini, maka fokus AMANAT ke depan seharusnya mulai ditujukan untuk penguatan kapasitas pertanian, peningkatan ketahanan ekonomi, dan pengelolaan tanah yang berkelanjutan bagi para anggotanya.

Penelitian ini berkontribusi terhadap kajian reforma agraria dengan menunjukkan bagaimana gerakan petani akar rumput mampu untuk mendorong arah kebijakan reforma agraria melalui aksi kolektif, pembangunan jaringan, dan keterlibatan politik. Model AMANAT memberikan pembelajaran penting bagi gerakan serupa, serta memperkuat urgensi kebijakan pertanahan yang inklusif dan partisipatif.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut ini disampaikan beberapa saran untuk memperkuat dampak gerakan petani terhadap reforma agraria serta mendorong kebijakan pertanahan yang lebih inklusif dan berkeadilan

1. Penguatan Kapasitas Organisasi Petani
  - AMANAT perlu memperluas perannya tidak hanya sebagai gerakan advokasi, tetapi juga sebagai organisasi yang mendorong penguatan kapasitas petani dalam pengelolaan sumber daya agraria secara berkelanjutan.
  - Penguatan tata kelola internal organisasi dan peningkatan keterampilan kepemimpinan bagi anggota dapat meningkatkan daya tawar dalam advokasi kebijakan.
2. Peningkatan Produktivitas dan Kemandirian Ekonomi Petani
  - Selain memperjuangkan hak atas tanah, AMANAT perlu mengembangkan perannya sebagai wadah peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan ekonomi petani.
  - Perlu ada peningkatan keterampilan petani melalui program pelatihan terkait pengelolaan lahan pasca-reforma agraria, seperti praktik agroekologi dan akses terhadap teknologi pertanian.
  - Pemerintah dan lembaga pendukung dapat memberikan akses terhadap teknologi pertanian, modal usaha, serta pendampingan dalam pengelolaan lahan pasca-reforma agraria agar petani dapat meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan.
3. Kebijakan Reforma Agraria yang Lebih Progresif
  - Pemerintah perlu mempercepat legalisasi hak atas tanah bagi petani di lokasi eks-HGU serta mengembangkan mekanisme perlindungan hukum dan pengawasan yang efektif agar tidak terjadi proses fragmentasi atau alih fungsi lahan yang merugikan petani kecil.
  - Pemerintah perlu memastikan bahwa reforma agraria tidak hanya sebatas redistribusi tanah, tetapi juga mencakup akses terhadap sarana produksi, modal usaha, serta jaminan pasar bagi petani kecil.
4. Peningkatan Sinergi antara Gerakan Petani dan Pemangku Kepentingan
  - AMANAT perlu terus memperkuat jaringan dengan LSM, akademisi, serta lembaga pemerintah untuk meningkatkan daya tawar dalam perumusan kebijakan agraria.
  - Diperlukan mekanisme dialog reguler antara petani, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada petani kecil.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan reforma agraria di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan petani kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benford RD & Snow DA. 2000. Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology*. 26, 611–639. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611>
- Borras SM & Franco JC. 2010. Contemporary Discourses and Contestations around Pro-poor Land Policies and Land Governance. *Journal of Agrarian Change*. 10(1): 1-32. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2009.00243.x>
- Brocket CD. 1991. The Structure of Political Opportunities and Peasant Mobilization in Central America. *Comparative Politics*. 23(3): 253-274. <https://doi.org/10.2307/422086>
- McCarthy JD & Zald, MN. 1977. Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology* 82(6): 1212-1241. <https://doi.org/10.1086/226464>

- Mustain. 2007. *Petani vs Penguasaan: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta (ID): Ar Ruzz media.
- Sihaloho M. 2004. *Konversi Lahan dan Perubahan Struktur Agraria* [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Shohibuddin M & Salim N. Eds. 2012. *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan*. Yogyakarta (ID): STPN Press.
- Shohibuddin M. 2018. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*. Yogyakarta (ID): STPN Press.
- Shohibuddin M. 2019. *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria*. Yogyakarta (ID): Baitul Hikmah.
- Susanto NH. 2015. Gerakan Sosial Petani Desa Banjarnanyar dalam Memperjuangkan Lahan Pertanian. *Jurnal Penelitian*. 12(2): 295-314.
- Syahyuti. 2004. Kendala Pelaksanaan *Landreform* di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 22(2):89-101.
- Tarrow S. 1998. *Power in Movement Social Movement and Contentious Politics*. Cambridge (UK): Cambridge University Press.
- Tilly C. 1977. *From Mobilization To Revolution*. Michigan (US): University of Michigan.
- Wiradi, G. 2009. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir (Edisi Revisi)*. Bandung (ID): Akatiga.